

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN BIRO UMUM DI SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI SELATAN

Andi Ghefira Salzabila^{1*}, Ihyani Malik², Hafiz Elfiansya Parawu³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

Supervision or controlling, namely an activity that aims to ensure that the implementation of an activity can run as planned. Supervision indicators are standard setting, assessment or evaluative, corrective action and work measurement. The aim of this research is to describe and explain the influence of supervision on the productivity of Civil Servants in the General Bureau at the South Sulawesi Regional Secretariat. This research is quantitative research using a survey method which aims to determine the effect of supervision on the work productivity of civil servants in the general bureau at the South Sulawesi regional secretariat. The research population was civil servants in the general bureau at the South Sulawesi governor's office, totaling 67 people with a sampling technique using random sampling. Data collection techniques use data prerequisite tests and simple linear regression. Based on the research results of the linearity test, the F value of the output obtained the calculated F value = 1.534 while the F table = 4.02. If F count < F table, H0 with a value of 1.534 < 4.02 can be stated that there is a significant influence of supervision (X) on productivity (Y).

Keywords: *civil servants, controlling, productivity*

Abstrak

Pengawasan atau *controlling*, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Indikator pengawasan adalah penetapan standar, penilaian atau evaluative, tindakan koreksi dan pengukuran kerja. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh pengawasan terhadap produktivitas Pegawai Negeri Sipil Bagian Biro Umum Di Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil bagian biro umum di sekretariat daerah sulawesi selatan. Populasi penelitian yaitu PNS di biro umum di kantor gubernur Sulawesi Selatan yang berjumlah 67 orang dengan teknik sample menggunakan sample random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan uji prasyarat data dan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian uji linearitas nilai F dari output diperoleh nilai F hitung = 1,534 sedangkan F tabel = 4,02. Jika F hitung < F tabel, H0 dengan nilai 1,534 < 4,02 dapat dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengawasan (X) dengan Produktivitas (Y).

Kata kunci: pegawai negeri sipil, pengawasan, produktivitas

* andighefira@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia atau PNS yang efektif dan terarah merupakan kunci menuju peningkatan sebuah organisasi sehingga kebijakan organisasi untuk menggerakkan sumber dayanya sangat dibutuhkan (Andrianto & Noviani, 2021). Dalam suatu organisasi perusahaan maupun instansi pemerintah membutuhkan pengawasan yang baik pada pegawainya demi menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif (Doman & Doman, 2020). Produktifitas yang meningkat dihasilkan dari kinerja seseorang atau pegawai yang dilihat dari cara seseorang bekerja dengan baik dan benar agar bisa sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dari pihak perusahaan dan mendapatkan target yang ditentukan (Ratulangi et al., 2022).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting dalam suatu organisasi (Wulandari & Simon, 2019). Dalam wadah kegiatan itu, setiap PNS harus jelas tentang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pemanfaatan PNS secara efektif, merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan suatu

organisasi tergantung pada *skill* maupun keterampilan PNS-nya masing-masing yang bekerja di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka kedudukan Biro Umum Dan Perlengkapan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi. Tugas pokok tersebut yaitu menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan di bidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keuangan sekretariat daerah provinsi serta merumuskan program dan analisa kebutuhan perlengkapan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi serta pembinaan barang.

Sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah di lingkungan Sekretariat Daerah tentu Biro Umum Sekretariat Daerah tentunya mempunyai tugas dan rencana pekerjaan yang sangat penting. Karena dalam pelaksanaan tugasnya Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan harus berpedoman pada mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi, baik itu lembaga atau pemimpin kantor harus memiliki keterampilan teknis serta mampu meningkatkan mutu kerja dalam proses pelaksanaan tugasnya, sehingga tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi dapat dicapai dengan cara yang baik.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan diketahui bahwa pelayanan di Biro Umum tingkat kepuasan sebesar 67,1% dalam bentuk diagram lingkaran responden yang merasa sangat puas. Hal tersebut menunjukkan tingkat kinerja Biro Umum sudah mencapai taraf baik dalam pelayanannya. Namun perlu ditingkatkan lagi karena keterampilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih ada yang gagap teknologi sehingga kerap kali dibantu oleh tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian tupoksi dan jabatannya tentu berpengaruh terhadap kinerjanya.

Hal tersebut memerlukan pengawasan yang ketat terhadap pegawai ketika bekerja dan berkomitmen bersama mewujudkan suasana kerja yang produktif, karena faktor terpenting dalam mencapai tujuan organisasi dilingkungan pemerintahan

adalah dengan meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang berhubungan dengan kemampuan pegawai bekerja secara produktif untuk menghasilkan kualitas kerja yang baik (Golla et al., 2018). Upaya meningkatkan produktivitas kerja pimpinan dapat melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung, seperti melakukan pengamatan ditempat kerja, memberikan laporan baik tertulis maupun lisan, dan sebagainya.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegaaian nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok tentang kepegawaian adalah sebagai berikut :“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan

Sebagaimana diketahui bahwa pegawai negeri merupakan unsur pendukung pelaksana dalam membantu pemerintah dalam roda pembangunan.

PNS berkewajiban setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kamus bahasa indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Maka secara harafiah pengawasan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.

Pengawasan atau *controlling*, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan hukum pemerintahan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin sikap dan tindakan pemerintah aparat administrasi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian jika dikaitkan dengan Hukum Tata Negara, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk tujuan jaminan agar penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku (Mustika, 2018).

Pengawasan pelayanan publik dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Pengawasan pelayanan publik dapat memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini adanya kepastian waktu yaitu keputusan diterbitkan paling lama 10 hari dan apabila tidak diterbitkan dianggap mengabulkan, dan apabila keputusan telah diterbitkan tetapi merugikan bisa memohon ke pengadilan Tata Usaha Negara. Jika ada tindakan malaadministrasi dapat dilaporkan kepada Ombudsman. Dalam mengatasi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun dalam

aturan ini hanya mengawasi secara represif, sedangkan seharusnya pengawasan pelayanan publik dilakukan secara preemptive oleh atasan dan preventif yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebelum terjadi kerugian negara (Asyikin, 2020).

Konsep pengawasan dari Mockler ialah menekankan pada hal-hal berikut, yaitu: (1) harus adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan (4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan. (Inspektorat Sulbar, 2020).

Jika kita berharap pelayanan publik semakin hari semakin baik maka pengawasan internal menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. UU Pelayanan Publik membagi pengawas

internal yaitu pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pengawas internal, khususnya oleh atasan langsung yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi terlapor/atasan terlapor dan jika tidak ada tanggapan dapat menyampaikan laporan atau pengaduan tersebut kepada Ombudsman RI. Fungsi kontrol dari pengawas eksternal ini menjadi penting untuk saling bersinergi, sehingga diharapkan penyelenggara pelayanan publik bergerak cepat melakukan berbagai upaya perbaikan dari setiap rekomendasi yang diberikan oleh pengawas eksternal tersebut.

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan dilakukan seiring dengan

proses, sejak awal sampe akhir. Oleh karena itu pengawasan juga meliputi monitoring dan evaluasi.

Pada dasarnya kata produktifitas merupakan kata serapan yang dipinjam dari bahasa Inggris, yaitu produktifitas. Dimana produktivitas terbentuk dari gabungan dua kata yaitu produk dan aktivitas. Seperti dikutip dari laman *Dictionary cambridge*, sejak asal kata, produktivitas adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, umumnya merupakan kemampuan setiap individu, sistem atau perusahaan untuk menghasilkan apa yang ingin Anda gunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Kata produktivitas itu sendiri memiliki unsur yang sama dengan daya produktif dan produktivitas. Istilah ini sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu pabrik, mesin, perusahaan, fasilitas, sistem, atau orang dalam mengubah suatu masukan menjadi keluaran yang diinginkan. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa produktivitas itu sendiri mengandung tiga faktor penting.

Upaya meningkatkan produktivitas kerja pegawai di suatu instansi perlu memerhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai tersebut.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja pegawai baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan instansi dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan setelah melaksanakan seminar proposal dan Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekertariat Daerah Sulawesi Selatan. Yang dimana objek penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Pegawai Negeri Sipil Bagian Biro Umum Di Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan”. Alasan memilih judul ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Pegawai Negeri Sipil Bagian Biro Umum Di Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan, dan lokasi ini sangat mendukung penelitian ini karena mudah dijangkau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sebagai strategi penelitian. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis, dan replicable/dapat diulang. Metode ini dapat juga disebut sebagai metode konfirmatif, karena cocok digunakan untuk pembuktian/konfirmasi. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2018).

Penelitian Kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metoda statistik. Penelitian Deskriptif menganalisis data secara sistematis. Pendekatan deskriptif analisis yang digunakan yaitu analisis persentase dan analisis kecenderungan, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat umum. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian survei (Helmina Andriani, 2020).

Penelitian ini, peneliti menggunakan populasi dan sampel, adapun populasi dan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: pada penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Di Biro Umum Di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang berjumlah sebanyak 67 orang dan sampel penelitian ini sebanyak 57 orang Pegawai Negeri Sipil Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah: Kuesioner atau angket dan *Internet searching*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian ini dengan menggunakan beberapa indikator yang telah di tetapkan sebagai dasar dalam menentukan hasil penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

Pengaruh Penetapan Standar (X1) terhadap Produktivitas (Y)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penetapan standar terhadap produktivitas maka dapat dilakukan analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisis data, maka peneliti menggunakan alat bantu SPSS 23.

Pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan standar.

Variabel pengawasan di ukur dalam 4 indikator Menurut Handoko (Sitepu 2020), yaitu penetapan standar, pengukuran kerja, penilaian kinerja dan tindakan koreksi.

Variabel Penetapan Standar sebagai variabel Independent dan Produktivitas sebagai variabel Dependent.

Nilai kolerasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,492 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,242, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (penetapan standar) terhadap variabel terikat (produktivitas sebesar 24,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk menguji penetapan standar terhadap produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian Biro Umum di sekertariat daerah Sulawesi Selatan, pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Pada Tabel Anova menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Penetapan Standar (X_1) terhadap variabel Produktivitas (Y), dari output tersebut terlihat bahwa F hitung = 17,576 dengan tingkat signifikansi/ probabilitas $0,000 <$

0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel produktivitas atau dengan kata lain ada pengaruh variabel penetapan standar (X_1) terhadap variabel produktivitas (Y).

Nilai Constant (a) sebesar 67,348 sedang nilai Kualitas kerja (b) 2,656 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: $Y = a + bX$ atau $Y = 67,348 + 2,656$. Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dijelaskan: Konstanta sebesar 67,348 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Produktivitas dalam sebesar 67,348 Koefisien regresi X sebesar 2,656 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai Penetapan Standar, maka nilai produktivitas bertambah sebesar 2,656.

Dari tabel Output Coefficients dapat diketahui nilai t hitung = 4,192 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) Variabel Penetapan Standar (X_1) terhadap variabel Produktivitas Kerja Pegawai PNS Bagian Biro Umum (Y).

Pengaruh Penilaian atau Evaluative (X₂) terhadap Produktivitas (Y)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penilaian atau evaluative terhadap produktivitas kerja pegawai, dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berikut adalah hasil analisis regresi linier sederhana.

Pada tabel ini variabel yang dimasukkan adalah variabel Penilaian atau *Evaluative* sebagai variabel Independent dan Produktivitas sebagai variabel Dependent.

Nilai kolerasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,472 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,222, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (penilaian atau *evaluative*) terhadap variabel terikat (produktivitas) sebesar 22,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk menguji Penilaian atau evaluative terhadap

produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian Biro Umum di sekretariat daerah Sulawesi Selatan, pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Pada Tabel Anova menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Penilaian atau evaluative (X₂) terhadap variabel Produktivitas (Y), dari output tersebut terlihat bahwa F hitung = 15,729 dengan tingkat signifikansi/probabilitas $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel produktivitas atau dengan kata lain ada pengaruh variabel penilaian atau evaluative (X₂) terhadap variabel produktivitas (Y).

Nilai Constant (a) sebesar 81,234 sedang nilai Kualitas kerja (b) 2,034 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: $Y = a + bX$ atau $Y = 81,234 + 2,034$.

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dijelaskan: Konstanta sebesar 81,234 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Produktivitas adalah sebesar 81,234 Koefisien regresi X sebesar 2,034 menyatakan bahwa setiap

penambahan 1 nilai Penetapan Standar, maka nilai produktivitas bertambah sebesar 2,034.

Dari tabel Output Coefficients dapat diketahui nilai t hitung = 3,966 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) Variabel Penilaian atau Evaluative (X_2) terhadap variabel Produktivitas Kerja Pegawai PNS Bagian Biro Umum (Y).

Pengaruh Tindakan Koreksi (X_3) Terhadap Produktivitas (Y)

Variabel Penilaian atau *Evaluative* sebagai variabel Independent dan Produktivitas sebagai variabel Dependent. variabel yang dimasukkan adalah variabel Tindakan Koreksi sebagai variabel Independent dan Produktivitas sebagai variabel Dependent.

Menjelaskan nilai kolerasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,644 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,415, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (tindakan koreksi) terhadap variabel terikat

(produktivitas) sebesar 41,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk menguji tindakan koreksi terhadap produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian Biro Umum di sekretariat daerah Sulawesi Selatan, pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Pada Tabel Anova menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Tindakan Koreksi (X_3) terhadap variabel Produktivitas (Y), dari output tersebut terlihat bahwa F hitung = 38,944 dengan tingkat signifikansi/probabilitas $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel produktivitas atau dengan kata lain ada pengaruh variabel tindakan koreksi (X_3) terhadap variabel produktivitas (Y).

Nilai Constant (a) sebesar 65,324 sedang nilai Kualitas kerja (b) 3,910 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: $Y = a + bX$ atau $Y = 65,324 + 3,910$.

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan

pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dijelaskan: Konstanta sebesar 65,324 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Produktivitas adalah sebesar 65,324 Koefisien regresi X sebesar 3,910 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai Tindakan Koreksi, maka nilai produktivitas bertambah sebesar 3,910.

Dari tabel Output Coefficients dapat diketahui nilai t hitung = 6,241 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) Variabel Tindakan Koreksi (X_3) terhadap variabel Produktivitas Kerja Pegawai PNS Bagian Biro Umum (Y).

Pengaruh Pengukuran Kerja (X) Terhadap Produktivitas (Y)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengukuran kerja terhadap produktivitas kerja pegawai, dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berikut adalah hasil analisis regresi linier sederhana.

Variabel yang dimasukkan adalah variabel Pengukuran Kerja sebagai variabel Independent dan Produktivitas sebagai variabel Dependent.

Menjelaskan nilai kolerasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,605 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,366, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (pengukuran kerja) terhadap variabel terikat (produktivitas) sebesar 36,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk menguji pengukuran kerja terhadap produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian Biro Umum di sekretariat daerah Sulawesi Selatan, pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Pada Tabel Anova menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Tindakan Koreksi (X_4) terhadap variabel Produktivitas (Y), dari output tersebut terlihat bahwa F hitung = 31,694 dengan tingkat signifikansi/probabilitas $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel produktivitas atau dengan kata lain ada

pengaruh variabel pengukuran kerja (X_4) terhadap variabel produktivitas (Y).

Nilai Constant (a) sebesar 71,475 sedang nilai pengukuran kerja (b) 2,603 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: $Y = a + bX$ atau $Y = 71,475 + 2,603$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dijelaskan: Konstanta sebesar 71,475 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Produktivitas adalah sebesar 71,475 Koefisien regresi X sebesar 2,603 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai pengukuran kerja, maka nilai produktivitas bertambah sebesar 2,603

Dari tabel Output Coefficients dapat diketahui nilai t hitung = 5,630 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) Variabel Pengukuran Kerja (X_4) terhadap variabel Produktivitas Kerja Pegawai PNS Bagian Biro Umum (Y).

Pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dimana dari tabel tersebut dapat terlihat variabel yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya, variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar adalah variabel X_3 yaitu variabel tindakan koreksi yang memiliki nilai R square sebesar 0,415 dengan persentase sebesar 41.5%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang pengaruh pengawasan terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil bagian biro umum di sekretariat daerah Sulawesi Selatan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil berdasarkan tabel uji determinasi model summary nilai R square sebesar 0,493 (49,3%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (pengawasan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (produktivitas) sebesar 49,3%. Maka, dapat diartikan bahwa H_a yang menyatakan pengawasan berpengaruh terhadap produktivitas PNS diterima, dan konsekuensi H_0 ditolak. Variabel pengawasan berpengaruh terhadap produktivitas PNS sebesar 43,864%. Dan diketahui besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang memiliki

pengaruh paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya, variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah variabel X3 yaitu variabel tindakan koreksi yang memiliki nilai *R square* sebesar 0,415 dengan persentase sebesar 41.5%.

REFERENSI

- Andrianto, W., & Noviani, N. (2021). Tanggung Jawab Hukum Sumber Daya Manusia Potensi Basarnas Dalam Melakukan Tindakan Medis Terhadap Korban Bencana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), pp. 971–982.
- Doman, D., & Doman, N. (2020). Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), pp. 71-97.
- Golla, J., Rondonuwu, A., & Kairupan, J. (2018). Kinerja Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1 (1), p. 4.
- Ratulangi, R., Kaawoan, J., & Pangemanan, F. (2022). Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah Kecamatan Ratahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Suatu Studi Di Kantor Camat Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Governance*, 2, p. 4.
- Wulandari, U., & Simon, H. jhon. (2019). Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN*, pp. 1–8.